

STUDI KRITIS HISTORIS KOMUNIKASI MENTERI PENERANGAN HARMOKO DENGAN PERS DI ERA ORDE BARU

Panggih Sundoro

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
yugihs@gmail.com

Abstract

The study the historical-critical communication study of Information Minister of Harmoko and press in New Order Era is an interesting phenomenon particularly during the rule of the New Order government. The struggle for freedom of the press is the symbol of press struggle like in the American Revolution. It also prevails for Indonesian press with its major figures. They were successful to insert the freedom of the press in some articles of the 1945 Constitution. After the independence, however, Indonesian press did not get the freedom instantly. In the New Order Era, the press was under the control of the government of President Suharto through the hand of Information Minister Harmoko during his three periods of ministerial office. Finally, Harmoko, a former journalist, occupied the position of Chairman of MPR RI (People's Consultative Assembly of Republic of Indonesia). Harmoko's communication skill to control the Indonesian press were carried out through some measures, i.e. the establishment of Indonesian Journalists' Association (PWI), the control of Indonesian Press Board and The Indonesian News Publishers' Association (SPS) as well as the appointment of chief editors as the Golkar party officials. Harmoko also adopted the Press Law Number 21 of 1982 and issued Press Publication Permit (SIUPP). The study applies qualitative research constructivist paradigm. It occurs in the past because it uses historical approach and public relations theories, mass media/press communication, sociological communication, psychological communication and political communication.

Keywords: Harmoko, freedom of the press, New Order

Abstrak

Penelitian studi kritis historis komunikasi Menteri Penerangan Harmoko dengan pers di era Orde Baru, adalah merupakan fenomena yang menarik di era Orde Baru. Dalam perjuangan kebebasan pers yang sudah menjadi symbol perjuangan pers seperti dalam revolusi Amerika. Demikian pula pers Indonesia dengan tokoh-tokohnya berhasil mencantumkan kebebasan pers dalam UU Dasar 1945. Namun kenyatannya setelah merdeka pers Indonesia tidak selalu mendapatkan kebebasan itu. Terutama pada era Orde Baru dimana pers nyata-nyata dikendalikan oleh pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Suharto, dengan peranan utamanya Menteri Penerangan Harmoko yang dipercaya sampai tiga periode, dan pada akhirnya Harmoko mantan wartawan, menduduki jabatan Ketua MPR. Kemampuan komunikasinya dalam usaha mengendalikan pers Indonesia adalah memasukkan dalam satu organisasi PWI, penguasaan Dewan Pers, SPS dan para pimpinan redaksi menjadi pengurus partai Golkar. Demikian pula melegalisasi UU Pers No 21/82 dengan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) sebagai senjata pamungkas menghadap pers yang bandel. Metode kualitatif dengan paradigma konstruktif dimana karena waktu sudah lampau dengan pendekatan sejarah. Serta teori-teori Humas, komunikasi media massa/pers, komunikasi sosiologi, komunikasi psikologi dan komunikasi politik.

Kata kunci: Harmoko, kebebasan pers, orde baru

PENDAHULUAN

Menurut Menteri Penerangan di era Orde Baru Harmoko, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat menciptakan *in-tuneness*, artinya komunikasi yang dapat sesuai dengan keinginan dan tepat mengenai sasaran dan berhasil mempengaruhi opini publik. Suatu

komunikasi yang menyampaikan pesan dan gagasan dapat menggugah dan menggerakkan hati komunikan atau sasaran (1986:68-69). Sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih mudah ditangkap dan dimengerti dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan diterima untuk

diamalkan. Harmoko juga mengatakan dalam berkomunikasi harus memperhatikan proses psikologis, karena factor psikologis komunikasi dalam mengambil sikap terhadap informasi, bukan hanya partisipasinya, juga menentukan apakah pesan itu sungguh-sungguh diterima oleh komunikasi seperti yang disarankan komunikator. Berkat kemajuan ilmu komunikasi dan teknologi komunikasi, hasilnya lebih jauh mencapai sasaran yang lebih luas pengaruhnya. Dengan demikian komunikasi yang diimplementasikan oleh Harmoko selaku Menteri Penerangan tidak lepas dari pembinaan terhadap partner yaitu pers Indonesia.

Karena kenyataannya hakekat dari komunikasi itu sendiri adalah mengangkat image pemerintah Orde Baru, khususnya Presiden Suharto, akhirnya tumbang dengan meninggalkan citra sebagian sebagian bagus, tetapi sebagian lagi mengatakan sebagai pemerintahan dengan sistem yang otoriter. Pada 29 Mei 1998 Presiden Suharto mundur, dengan demikian berakhir lah Orde Baru. Bahkan Presiden Abdurachman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, karena gagal dalam tugasnya sebagai Humas pemerintah. Demikian kejatuhan Presiden Sukarno tragis juga, dengan meninggalkan sejarah pers kelabu Indonesia Sementara itu pers Indonesia di era reformasi mengalami euforia, kadang-kadang kebebasan yang didapat menjadi kebebasan yang kebablasan.

LITERATUR DAN METODOLOGI

Menurut Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relations (2002:6) yang mengutip dari Roberto Simoes cara berpikir seorang PR adalah *Public Relations* atau Humas (Hubungan Masyarakat) 1. *Public Relations* adalah suatu proses /intergrasi; 2. *Public Relations* merupakan fungsi manajemen; 3. *Public Relations* merupakan suatu kegiatan kreativitas; 4. *Public Relations* merupakan suatu tugas dalam multi disiplin ilmu.

Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam buku *Effective Public*

Relation maka Humas seharusnya memiliki fungsi dan peran mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Gordon merangkum tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai berikut: Humas pemerintah harus mampu memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. Humas harus dapat memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; *voting, curbside recycling*, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban. Dengan berbagai cara dapat mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana. Dengan cara melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi. Petugas humas mampu mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan.

Terhadap pers memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. Dengan berbagai cara yang rasional membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan.

Humas dipemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi informan kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajiban apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan

masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Membantu pimpinan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan departemen untuk informasi kepada masyarakat. Fungsi lain yang tak kalah pentingnya pembinaan hubungan kerjasama media massa dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan. Untuk mendukung fungsi itu Humas menurut Rosady Ruslan, pertama mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Kedua memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan/informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. Ketiga menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif, dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. Keempat dapat berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengaruh Media Massa/Pers Terhadap Opini

Menurut Denis Mc Quail yang dikutip oleh Laurence Grossberg et all (1998:244) mengatakan pengaruh media massa (pers) untuk memberikan pengaruh atau kepuasan kebutuhan informasi individu. Sedangkan kepada khalayak adalah memberikan informasi untuk dapat pelayanan dari masyarakat. Artinya melalui berita atau pesan media massa/ pers itu, ia bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Pendapat Grossberg ada hubungannya dengan pendapat Elizabeth Noelle Neuman yang mengatakan media massa mempunyai dampak yang sangat kuat pada opini public. Karena media massa/pers mempunyai tiga karakteristik: yaitu komunikasi, ubikuitas, dan harmoni. Komunikasi mengacu kepada pembesaran tema-tema atau pesan-pesan tertentu secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Ubikuitas, mengacu kepada kehadiran

media yang luas. Harmonis adalah mengacu kepada gambaran tunggal dari sebuah kejadian atau isu yang dapat berkembang dan sering dipergunakan bersama surat kabar, majalah, televisi, dan media lain yang berbeda-beda (Werner Severin 20003:5).

Pers sebagai media politik adalah: 1) Pers yang melayani kepentingan politik, memperoleh citra sebagai pers politik. 2) Pers sebagai organ partai yang menyuarakan ideologi politik tertentu (*party bound press*), yaitu pers yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak atau kebijakan partai. 3) Pers sebagai simpatisan partai atau ideologi tertentu (*party directed press*), yaitu pers yang tidak didominasi oleh partai politik melainkan hanya mendukung secara bebas suatu cita-cita politik. 4) Pers yang dikuasai oleh politisi atau aktivis maka pers akan memperoleh citra sebagai pers politik. Pers itu dibina oleh profesional, maka pers itu dapat memiliki sebagai pers informasi yang pada umumnya melayani kepentingan bisnis, sehingga disebut sebagai pers bisnis (pers komersial). 5) Pers perjuangan maupun pers partai didirikan dan dipimpin oleh politisi atau aktivis dan bukan oleh profesional

Peranan Media Massa/Pers Terhadap Pemberitaan

Menurut Denis McQuail (2000), media massa /pers memiliki beberapa ciri khas. *Pertama*, media massa/pers bertugas sebagai distributor pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan dan budaya. *Kedua*, media massa/pers menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain. *Ketiga*, media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan publik, dan merupakan institusi terbuka bagi semua orang untuk berperan serta sebagai penerima. *Keempat*, partisipasi anggota khalayak dalam institusi pada hakikatnya bersifat sukarela tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. *Kelima*, industri media massa/pers dikaitkan dengan industri pasar, karena industri media massa/pers selalu berkaitan dengan ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi,

dan pembiayaan atas operasionalisasi media tersebut. *Keenam*, media berkaitan dengan kekuasaan negara.

Fungsi Media Massa/Pers

Menurut Lasswell dan Wright dalam *Mediating the Message* (Shoemaker dan Reesse, 1996) media massa/pers memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu: 1) media massa/pers mempunyai fungsi pengawasan lingkungan, atau fungsi *Surveillance of Environmen.*, media berupaya mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai berbagai peristiwa di dalam atau di luar lingkungan masyarakat. Berita yang disebarluaskan sebagai peringatan awal agar khalayak dapat menilai dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang dan berubah. Fungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini publik, memonitor dan mengontrol kekuasaan, dan sebagainya. 2) media massa / pers mempunyai fungsi *correlation of the parts of society*, maksudnya untuk korelasi antar bagian bagian dalam masyarakat dalam memberi respons terhadap lingkungan. Fungsi ini berkaitan dengan interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai konsensus dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi. 3) media massa/pers mempunyai fungsi *transmission of the social heritage*, maksudnya untuk transmisi/sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai pengetahuan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Pada fungsi ini, media massa/pers dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi. Dengan adanya. Informasi yang diterima anggota masyarakat tertentu merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Fungsi media massa/pers ini menjadi sangat penting dalam memelihara identifikasi anggota-anggota masyarakat bersangkutan. Dahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan guru-guru sekolah, namun dengan adanya urbanisasi yang meninggalkan keluarga atau merantau, atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang banyak. Peranan media massa/pers menjadi amat penting dalam proses sosialisasi

dan pemindahan warisan sosial. 4) media massa/pers mempunyai fungsi *entertainment*, maksudnya fungsi ini menunjuk pada usaha-usaha yang dilakukan media massa dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi ini menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.

Komunikasi politik

Menurut Dan Nimmo (1981 : "*Political communication as a field of inquiry is cross disciplinety* " , maksudnya bahwa komunikasi politik melintas berbagai disiplin ilmu. Sebab politik sendiri mempunyai pengetahuan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Dapat pula diartikan sebagai pembagian nilai-nilai yang berwewenang, Sementara itu menurut Fagen(De Nimmo, 1981)memberikan definisi Komunikasi Politik sebagai *Communicatory acitivity considered political by virtue of its consequences ,actual and potencial, that it has for the functioning of political system* ".

Komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi pesan-pesan yang disampaikan berdasarkan pertimbangan kepentingan politik yang didasarkan oleh kebaikan dari adanya konsekwensi tanggungjawabnya, kenyataannya dan kemampuannya, dimana semua itu mempunyai untuk fungsi dari sistim politik yang di jalankan. Dengan demikian segala komunikasi yang sebenarnya untuk kepentingan dan mengandung unsur tujuan politik.

Berbeda dengan Meadow yang dikutip De Nimmo (1981), "mengatakan, *political communication refers to any exchange of symbols or message that to significant extent have been shaped by or have consequences for the political system*". Dengan demikian komunikasi politik adalah berkaitan dengan setiap pertukaran symbol atau pesan-pesan yang ditujukan kepada kepentingan lebih luas yang telah terbentuk oleh atau dari konsekwensinya adanya sistim politik yang dijalankan. Namun demikian Dan Nimmo menambahkan dari

kedua pendapat tersebut, adanya konsekuensi adanya aturan hubungan kemanusiaan dibawah kondisi adanya konflik .

Dalam komunikasi politik ini memegang peranan penting adalah komunikator politik yang membangun opini publik, sebagai kunci keberhasilan dalam komunikasi politiknya. Sebab komunikasi politik pada dasarnya adalah membangun opini publik. Politik itu adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Politik diartikan pula pembagian nilai- nilai oleh yang berwenang atau penguasa, dan politik lebih dapat dilihat sebagai usaha mempengaruhi orang lain untuk mempertahankan tindakan atau pun memperluas tindakannya, atau kekuasaannya. Mark Roelofs, dikutip Dan Nimmo (2000) mengatakan Politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik ('berpolitik') adalah berbicara. Jika dikaitkan dengan komunikasi maka politik itu seperti komunikasi. Yakni adanya pembicaraan yang tidak hanya sekedar berbicara tapi lebih bersifat luas, di situ ada proses pertukaran simbol-simbol, melalui kata-kata, gerakan tubuh, sikap dan cara berpakaian. Ini yang kemudian kita kenal sebagai transaksi, dan transaksi tersebut hanya bisa terjadi melalui proses komunikasi.

Landasan konsep

Pokok pikiran Harmoko tentang komunikasi, bahwa komunikasi dimungkinkan adanya masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki tumpuannya komunikasi (*communication is made possible by community and in turn, community is based upon communication*) dikutip dari Everett Kleinjans. Kleinjans mempermasalahkan mana yang lebih didahulukan komunikasi atau masyarakat, seperti dahulu mana ayam dan telur. Untuk dapat satu bahasa dan saling mendukung, maka Kleinjans menegaskan dalam suatu negara atau kelompok kultural, komunikasi didasarkan atas cara hidup, kepercayaan dan bertindak bersama. Dengan demikian maka komunikasi akan berjalan lancar, walaupun belum ada harus dicarikan atau diciptakan titik-titik kebersamaan, hingga pesan-pesan komunikasi

yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Cara mencari titik kebersamaan itu harus melalui komunikasi. Untuk komunikasi yang efektif kedua pihak antara komunikator dan komunikan harus memiliki pengalaman mengenai permasalahan yang mengandung kepentingan bersama yang saling menyilang seperti dikatakan Wilbur Scramm yang dikutip Harmoko (1986:21).

Menurut Harmoko dari kesimpulan beberapa fungsi komunikasi: 1) Fungsi *instrumental*, yaitu sarana untuk mencapai sesuatu tujuan atau sasaran, ataupun untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. 2) Fungsi *control*, dalam rangka pengarahannya dengan cara edukatif, persuasif, ataupun cara-cara yang lain, mendorong seseorang untuk berbuat sesuai dengan pola yang ditetapkan. 3) Fungsi *informative*, memberi informasi sekedar untuk mengetahui ataupun menerangkan mengenai sesuatu hal. 4) Fungsi *expression*, untuk menggugah perasaan dan merebut hati khalayak dengan cara-cara tertentu. 5) Fungsi *social contact*, berbaur dengan dalam masyarakat dengan jalan berpartisipasi dalam kelompok. 6) Fungsi *alleviation of anxiety*, atau meredakan kegelisahan dengan jalan memisahkan keruwetan dalam permasalahan, meredakan kecemasan mengenai sesuatu hal dengan memberikan informasi yang sebenarnya. 7) Fungsi *stimulation*, merangsang tanggapan terhadap sesuatu hal yang menjadi perhatian pada sesuatu waktu. 8) Fungsi *role-related*, menonjolkan peranan sektoral tertentu yang memerlukan penjelasan, penyuluhan, dan keterangan yang diperlukan mengenai sektor kegiatan kemasyarakatan tersebut.

Pers Pancasila Pers Bebas yang Bertanggungjawab

Menurut Sukarno (1988:217) Pers Indonesia harus berdasarkan falsafah Pancasila. Dasar Falsafah ini tertera dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) bahwa Pers Indonesia haruslah bertindak dan bersikap mencerminkan aspirasi masyarakat. Artinya pers haruslah

bertanggungjawab dan mengemban kepentingan masyarakat dan bangsa dalam menjalankan fungsi, kewajiban dan hak-haknya. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial dilandasi oleh tanggungjawab tersebut. Dari segi strategi GBHN, segi yuridisnya pada UU No 21/82, dan segenap peraturan pelaksanaannya. Dari segi kemasyarakatannya pada tata nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan segi etis pada norma-norma kode etik profesional.

Menurut Sukarno (1988:217), norma-norma profesional yang merupakan pegangan pers nasional: 1) Pers sebagai satu unsur media massa yang hadir ditengah-tengah masyarakat demi kepentingan umum, harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam suasana keserasian/sosiologis. Dalam hal ini, corak hubungan antara satu dengan yang lain tidak akan luput dari pengaruh falsafah yang dianut masyarakat dan bangsa kita yakni Pancasila dan juga dari struktur sosial dan politik yang berlaku di sini. 2) Berdasarkan norma-norma keserasian sosiologis yang dipedomani oleh Pancasila, pers Indonesia dalam pola pikir dan bekerjanya tidak akan dapat melepaskan diri dari nilai-nilai gotong-royong yang telah menjadiceri khas daripandangan dan sikap bangsa dan masyarakat. 3) Dalam melakukan fungsinya sehari-hari, partisipasi pers dalam pembangunan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lainnya 4) Hubungan antara pers dengan pemerintah terjalin dalam suatu bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan dalam mengusahakan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 5) Dalam Pembangunan, stabilitas politik, ekonomi dan sosial merupakan persyaratan mutlak untuk usaha pembangunan yang sedang diselenggarakan. Dalam hal ini hendaknya pers merasa ada "terpanggil" untuk membantu pemerintahan umum demi kemantapan stabilitas yang dinamis, tanpa mengurangi hak-haknya memberikan kritik yang sehat dan konstruktif dalam alam kebebasan pers yang bertanggungjawab. 6) Dalam negara yang

sedang membangun, pers sebagai lembaga masyarakat secara implicit perlu juga dibangun. Dalam hal ini pemerintah sejauh kemampuannya merasa "terpanggil" untuk membantu usaha-usaha pers dalam membangun dirinya sendiri, agar dalam waktu secepat mungkin pers mampu mengembangkan dirinya atas dasar kekuatan sendiri. 7) Jika terjadi perbedaan atau konflik pendapat antara pemerintah dan pers dalam menjalankan fungsinya, maka yang dijadikan dasar penyelesaian adalah ketentuan hukum yang berlaku. 8) Hubungan antara pers dan masyarakat dijiwai oleh semangat dan itikad baik untuk menjamin atau menegakkan azas kebebasan yang bertanggungjawab. 9) Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan umum, kontrol sosial, dan hiburan, pers menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Disatu pihak, pers ikut menajamkan daya tangkap dan daya tanggap masyarakat terhadap langkah kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Di lain pihak dapat dengan meningkatkan daya tangkap dan daya tanggap masyarakat akan tercermin dalam peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif pendapat umum yang disuarakan. Pers menjadi wahana untuk menyampaikan pendapat umum yang disuarakan. Pers menjadi wahana menyampaikan pendapat umum tersebut sebagai "denyut jantung" rakyat kepada pemerintah untuk dijadikan bahan pengkajian bagi tepat tidaknya langkah kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian pers membantu masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional melalui komunikasi dua arah. 10) Dalam suasana pembangunan dimana pers sendiri masih merupakan unsur pembangunan diri disegala bidang, dimana masyarakat perlu membantu dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan pers terhadap segala kekurangan yang terdapat dalam pers. Secara positif bantuan masyarakat itu dapat diwujudkan dalam menumpahkan kepercayaan kepada pers nasional sebagai salahsatu sumber informasi yang pokok. Dengan jalan demikian partisipasi masyarakat itu sendiri akan membawa

pertumbuhan dan perkembangan pers kearah yang dicita-citakan masyarakat. 11) Jika terjadi perbedaan atas konflik pendapat di dalam tubuh pers atau lingkungan pers sendiri, atau antara pers dengan masyarakat cq golongan dalam masyarakat, dicarikan penyelesaian atas dasar hukum yang berlaku, namun tetap berlandaskan pada itikad baik dari suatu pers yang bertanggung jawab dalam hidup Pancasila. Kebebasan pers itu menurut Siebert "*freedom of the press is not and never can be absolute.*" Dikatakan selanjutnya, "*the extent of government control of the press depends on the nature of the relationship of the government to the subject to the government. This relationship is characterized by the degree of accountability*".

Dari disertasi Krishna Harahap (Unpad, 2000), yang mengutip Komisi Hutchkins, mendefinisikan beberapa Kebebasan Pers. Kebebasan Pers adalah pers yang bebas dari paksaan mana pun, baik dari pemerintah maupun kekuatan sosial mana pun. Kendati demikian, tidaklah berarti pers bebas dari tekanan, karena tidak ada pers yang bebas dari tekanan. Kebebasan Pers, adalah pers bebas mengungkapkan pendapat. Untuk mencapai maksud tersebut pers harus menguasai sumber daya teknis dan keuangan, akses yang layak kesumber informasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengirim informasi. Kebebasan Pers, adalah pers yang bebas bagi siapa saja yang perlu untuk mengatakan sesuatu yang berguna bagi umum, karena tujuan pokok yang menjadikan pers bebas dihargai adalah gagasan yang patut didengar oleh umum dapat terlaksanan dengan baik. Kebebasan Pers, adalah pers merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam *Declaration of Human Right*. (2000:103).

Sementara itu dari, Oemar Seno Adji yang dikutip Krishna Harahap (2000:110) "Kemerdekaan Pers/kebebasan Pers harus diartikan sebagai kemerdekaan dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat alat dari ekspresi (ungkapan), seperti di negara-negara sosialis. Ia tidak mengundang

adanya sensor. Kebebasan Pers, ini bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya. Kebebasan Pers merupakan suatu kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu dengan syarat-syarat limitatif dan demokrasi, seperti oleh hukum nasional, hukum internasional dan ilmu hukum. Kemerdekaan/Kebebasan Pers dibimbing oleh tanggung jawab dan membawa kewajiban yang pers sendiri salurkan melalui *beroesepatiek* mereka.

Pengendalian pers dalam Kebebasan Pers

Kebebasan pers adalah wujud dari keikutsertaan warganya dalam melaksanakan kekuasaan negara. Kebebasan pers ini menurut undang-undang ada batasnya. Karena di samping adanya kebebasan itu juga ada rasa tanggung jawab nasional dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Adanya undang-undang itu juga membatasi kebebasan pers, seperti adanya SIT dan SIC, lalu SIUPP. Kebebasan pers itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat melalui pers. Pada akhirnya mengenai kebebasan pers itu tergantung kepada falsafah negaranya yang mengontrol dan menentukan power, Hasyim Nangtjik dimuat di buku ulang tahun harian *Sinar Harapan* (1986:245).

Menurut Oemar Seno Adji bahwa larangan terbit, baik sementara maupun selamanya identik dengan pembredelan pers, yang sebenarnya menurut Undang-undang Pers adalah tidak dibenarkan. Dalam TAP MPR No.II/MPR/1983, GBHN mengatakan dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam kaitan usaha itu maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Jadi, jelas dalam kedudukan pers yang bebas bertanggung jawab di Indonesia, benar-

benar dijamin secara konstitusional. Dengan demikian SIT oleh pemerintah dan SIC oleh KOPKAMTIB tidak diperlukan. Demikian pula dengan sensor terhadap pers, menurut Seno Adjie adalah tidak dibenarkan, tulisan Oemar Senoadji yang dimuat di buku ulang tahun harian *Sinar Harapan* (1986 :263)

Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan jenis fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara di mana orang menjadi paham akan objek dan peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Studi ini melihat obyek dan kejadian dari sudut pandang *diperceiver*, individu yang mengalami hal-hal tersebut (LitleJohn 1996:354). Fenomenologi menjadikan pengalaman hidupnya yang sesungguhnya sebagai data dasar dan realitas. Fenomenologi membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya, tanpa memaksakan kategori-kategori kita sendiri terhadapnya (LitleJohn 1996:355). Sebagaimana dikemukakan Moleong (2007), peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti, sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis adalah penelitian yang bersifat subyektif, sebab peneliti harus terlibat dalam penelitian ini. Demikian pula peneliti sudah mempunyai sikap dalam penelitian ini. Artinya dalam wawancara dengan sumber bisa juga terjadi perdebatan, atau juga perbedaan suatu data. Tokoh teori kritis generasi baru adalah Habermas, Teori kritis Habermas lebih mengemukakan evolusi daripada revolusi Paradigma penelitian adalah pola pikir (cara pandang, aliran, mazhab) mengenai keseluruhan proses, format dan hasil penelitian. Ragamnya adalah klasik, konstruktif, kritikal dan partisipatoris. Dalam pembahasan penelitian ini, menggunakan paradigma penelitian kritis. Paradigma kritis menempatkan ilmu sosial sebagai suatu proses

yang secara struktural nyata dari dunia materi. Paradigma kritis dapat mengungkap yang belum terungkap selama ini, dan dapat membuat suatu yang merupakan perbaikan selanjutnya. Maksudnya membantu membentuk kesadaran social untuk merubah dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Nilai, etika dan moral bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian. Partisipatif mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dari multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis /partisipan dalam proses transformasi sosial. Hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani nilai tertentu. Pemahaman suatu realitas merupakan value mediated findings. Menurut Agus Salim (2006:101) disarikan dari Guba and Lincoln (1994): *Competing Paradigma in Qualitative Research* in Devin and Lincoln (eds). *Handbook of Qualitative Research*, London. SAGE Publication. Neuman .L.(1997) *Social Research Methods :Qualitative and Quantitative Approaches* third Edition, New York :Allyn and Bacon.

Sebagai konsekuensi paradigma kritis, maka kecenderungan penelitian lebih bersifat kualitatif, yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memiliki minat teoretis pada proses penginterpretasian manusia, menitikberatkan pada kajian tindakan manusia yang disituasikan secara sosial, serta mengandalkan bentuk-bentuk naratif untuk mengkode data dan menulis teks untuk disajikan dalam bentuk ilustrasi pada khalayak (Deddy Mulyana, 1999:148). Teknik analisis data merupakan suatu tahapan mengurut-urutkan, mengelompokkan, memberi ide, dan mengategorikan serta menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan. Langkah-langkah penyusunan: *Pertama*, mengumpulkan data, dari dokumentasi instansi yang terkait, klipng Koran yang terkait. *Kedua*, melakukan tabulasi data yang telah dikumpulkan secara terpisah dari lingkungan pejabat pemerintah dan tokoh pers.

Menurut Harmoko, secara fungsional dan struktural pers/media dibawah Pembinaan

Departemen Penerangan. Sekarang karena apa, karena menyangkut ijin terbit dan ijin cetak. Kan kita sudah punya Undang undang, pers ada disana, apalagi adanya Kode etik Jurnalistik. Pers sendiri yang harus mampu melaksanakan Kode etik, yaitu bisa menimbang, bisa memutuskan bisa tidaknya pemuatan suatu berita. Oleh karena itu seolah olah semua dipertanggungjawabkan oleh pers sendiri, serahkan kepada pers sendiri bagaimana menglolanya. Di organisasi pers sendiri seperti PWI, SPS, semua karyawannya adalah PNS Departemen Penerangan, sama saja dengan kanorf pemerintah. Semua terdeteksi oleh pemerintah, bahkan KOPKAMTIB masuk dalam lingkungan kerja itu Alasannya, seperti yang dikatakan Menteri Harmoko lakukan Deppen dengan KOPKAMTIB adalah sama sama menjaga pengertian interaksi positif adalah antara pers . Dengan demikian apa yang dengan masyarakat, yaitu interaksi positif yang kita kembangkan. Antara Departemen Penerangan dengan Pers, masing masing menjalankan 3 pilar fungsi masing masing. Tiga pilar ini harus menjalankan fungsinya masing masing. Misalnya untuk pemerintah, Departemen Penerangan mengelola interaksi komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dengan pers tidak boleh menghambat dong, pemerintah yang dilakukan terhadap pers, dan pers harus mampu menjaga sebagai pers yang bebas bertanggungjawab sesuai dengan undang undang pers, juga Kode etik Jurnalistik, penting itu.

Tidak ada pers yang tiarap itu, terbuka itu, bahwa pers itu mampu mengembangkan dirinya, yaitu situasinya disana. Kita transparan interaksi itu juga ditetapkan oleh Dewan pers, interaksi politik antara pemerintah pers dan masyarakat. Dan pers seharusnya juga begitu, kalau ada yang dirugikan pers adukan ke pengadilan, jangan mengadili sendiri.

Pada jaman Orde Baru, kerjasama antara Deppen dan pers sendiri, sangat baik sekali, karena apa, karena kita sama sama melaksanakan undang undang. Waktu itu organisasi wartawan hanya satu PWI, SPS satu. Grafika satu. Deppen bersama Institusi Pembina Pers lainnya selalu mengadakan pertemuan dengan DPR yaitu Komisi I DPR.

Parni Hadi, mantan Sekjen PWI,

pandangannya terhadap pers Indonesia yang mempunyai kebebasan pers, namun ada pengendalian pers oleh pemerintah dan ABRI Dikatakan, saya pikir ada tahapan dalam sejarah bangsa, tahapan yang mengutamakan stabilitas, itulah pendekatan yang bisa salah dan juga bisa benar dari segi politis. Seperti contohnya Malaysia dan Singapura, sampai sekarang pers dikendalikan, juga Cina dikendalikan. Tentang adanya pengendalian pers itu ada manfaatnya atau tidak.

Menurut Parni Hadi sebagai wartawan tahun 1973, mengalamai masa Orde Baru dan mengalami masa Reformasi. Menurut saya karena tuntutan keadaan memang harus dikendalikan. Saya sebagai wartawan bekerja kreatif, susah dikendalikan bisa memahami dan alhamdulillah bisa mengikuti. Pers terkendali , karena tuntutan keadaan memang harus dikendalikan. Saya sebagai wartawan bekerja kreatif, susah dikendalikan bisa memahami dan alhamdulillah bisa menemukan jalan . Memang tidak semua orang mempunyai keberanian, atau meniti jalan kreatif atau mungkin sedikit kompromistis. Maunya orang "*Longing the Bye*", mudah mudahan saya dapat membuktikan bahwa dalam Orde Baru saya mempunyai bukti sebagai wartawan yang berani. Seperti tentang Petisi 50, katanya dilarang saya menyiarkannya di ANTARA. Caranya tentunya yang dapat diterima Orde Baru. wartawan itu pekerja intelektual, kritis, bersahabat dengan siapa saja. Apalagi dengan pihak intelejen harus kenal baik, karena pekerjaan wartawan sama dengan intel.

Wartawan dapat menjadi komunikator mempertemukan pihak pihak yang berselisih. ANTARA zaman itu sangat menentukan, Saya di ANTARA menyiarkan berita dimana tidak ada satu koranpun yang menyiarkan berita itu menyiarkan, disitu ada keberanian sedikit. Waktu itu Pak Harto berkunjung ke Kalimantan Barat, saya wartawan istana. Pak Harto berkunjung ke transmigrasi di Kalimantan Barat. Biasa laporan Gubernur sukses, laporan menteri sukses. Tetapi waktu dialog dengan para transmigran itu, Pak Harto mendapat keluhan "Aduh bapak, nasib kami pagi makan siang tidak, pagi tidak makan siang makan "Saya puter otak, bagaimana dapat memberitakan ini, tujuh keliling berpikir bagaimana bisa masuk

di ANTARA

Yacob Utama Pemimpin Umum Komasp, mantan Ketua Umum Pusat PWI, berpendapat militer ABRI itu terlibat dalam pemerintahan, maksud saya seperti krisis yang besar Tanjung Priok lalu demo-demo. Kritik yang dianggap berlebihan pasti mereka campur tangan. Berlebihan artinya terlalu keras, terlalu ekstrim, memberitakan suatu peristiwa yang dianggap kalau berita itu tersiar membuat keadaan lebih parah lebih jelek geting worst. Karena bagaimanapun ABRI itu bertanggungjawab soal aman, damai, tertib, itu yang dianggap keadaan ideal, dari ukuran kacamata ABRI. Yacob Utama dikritik oleh Rosihan Anwar, Jurnalisme kepiting, karena yang menulis Brower. Kita maju, kita maju, kita maju, hus ada bahaya, lha kita mundur sedikit, itu yang saya maksud. Sebab alternatifnya adalah bredel. Kadang kadang mlipir-mlipir. Kami semua pernah dibredel, (jaman pak Domo, Pangkopkamtib) waktu itu bredel paling lama tetapi Kompas paling duluan diizinkan terbit kembali. Setiap hari “saya *struggle with my conscience* (kata hati) bukan saya *exepcted as it is*. Kita tetap menjadi malu dengan himbauan himbauan itu.”

Namun dibagian saya sendiri kadang kadang overacting. Persis, karena dia khawatir, kalau salah ditegur dia. Memang tugas bawahan itu ya begitu kalau tidak malah lebih *overacting*, karena harus hati hati banget. Jadi memang ada sistim, tetapi sistimnya tidak jalan. Harmoko dia menurut saya orang sipil, tetapi ya masuk akal kalau itu memberikan pembinaan. Dia kan wartawan, besar sebagai wartawan. Masuk akal dan bagaimanapun dengan segala kelemahan dan kelebihan, dan watak Pak Harmoko kalau kebebasan yang merupakan syarat eksistensi pers itu, melekat. Jadi masuk akal kalau kecenderungannya adalah kebebasan. Cuma dia dalam posisinya sebagai Menteri Penerangan pembantu Presiden, maka harus menurut.” Saya malahan pada waktu itu berpendapat Indonesia barangkali “*unlighten despon*” maksudnya otoriter tetapi tercerahkan, otoriter tetapi *allout* benar-benar untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Kebebasan itu “*free and responsibilities*” kebebasan itu Kalau menurut tetap “*free and responsibilities*” punya tanggungjawab. Lalu kebebasan itu tetap

punya fungsi, diperlukan kebebasan supaya pers bisa menjalankan fungsinya. Fungsinya yang menonjol adalah mengontrol kekuasaan mengkritik kekuasaan dan itu relatif lebih mudah daripada kebebasan yang lain berikan pendidikan politik kepada rakyat, memberikan pendidikan yang memperkuat rasa persatuan kesatuan bagi bangsa dan negara yang bhineka tunggal eka ini, itu tidak mudah.

TEMUAN DAN DISKUSI

Didalam Undang Undang Pers sesuatu negara, tercermin sistem pers dari negara itu sendiri. Dengan kata lain UU pers itu menjelaskan bagaimana corak kebebasan pers dalam negara itu, Muis (1996:7). Demikian pula menurut Prof De Rooij yang juga mantan seorang wartawan senior Belanda yang dikutip oleh Yacob Utama (2013) mengatakan, “lambatlaun ideology suatu negara tempat surat kabar terbit dan bekerja akan mempengaruhi pandangannya, tidak bisa lain”. Maksudnya keberadaan pers di negara tersebut harus mengikuti sistim ideology negara tersebut. Kalau tidak akan tergilas keberadaannya, sebagaimana teori dari Siebert mengenai bentuk-bentuk pers dalam ideology negara masing-masing. Namun demikian juga terjadi adanya teori “*political decay*” dari buku Simatupang dari Sabam Siagian (2013) yaitu tuntutan perubahan demokrasi apabila kemakmuran telah dicapai rakyatnya. Walaupun dijamin Orde Baru belum sama sekali mencapai kesejahteraan yang merata. Untuk mengatasi keadaan tersebut, dalam hubungannya adanya kesenjangan antara pers dan pemerintah, wartawan/pers dan beritanya harus mengambil jarak dengan sumber berita. Jarak itu yang memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mempertahankan sikap seobyektif mungkin ,yang bagaimanapun juga toh tetap subyektif. Sebab tiap wartawan telah mempunyai sikap sendiri tentang pembuatan beritanya, dengan framing yang ia lakukan untuk pertama kali mendapatkan informasi. Inilah yang selanjutnya menjadi kendala adanya perbedaan persepsi komunikasi antara

pers dan pemerintah.

Ada lima ciri komunikasi pers: ciri publisitas, ciri universalitas, ciri periodesitas, ciri aktualitas dan ciri komersialitas. Ciri publisitas adalah pesan atau komunikasi pers terbuka untuk siapapun. Ciri universalitas isi pesan komunikasi persnya bermacam-macam. Pesan komunikasi pers yang nilai jurnalistik adalah penyebaran informasi untuk publik, opini publik, dan hiburan untuk publik yang sifatnya sistimatis dan dapat dipercaya melalui media komunikasi massa modern. Sedangkan ciri komunikasi aktualitas beritanya ada yang obyektif, baru, segar, hangat ada yang subyektif beritanya memang baru bagi orang tertentu saja. Ciri Komersialitas pers yang mempunyai fungsi berdagang atau pers adalah komoditi yang berkembang menjadi industri pers. Keempat ciri itu menurut Dr. K. Basschwitz yang dikutip oleh Muis (1996:12). Oleh Edwin Emery (1965)

Jurnalistik sebagai laporan tentang kejadian-kejadian yang sedang berlangsung pada saat ditulis, buka kajian yang definitif tentang sesuatu keadaan. Dengan demikian memang suatu berita tidak lepas dari kepentingan pers itu sendiri, sehingga suatu kejadian yang sama atau sumber berita yang sama, akan diberitakan menurut kepentingan pers itu sendiri. Sehingga dapat terjadi adanya perbedaan kepentingan antara penguasa dan pers. Karena penguasa diberi legalitas untuk melakukan pengendalian berita terhadap pers, maka pemberitaan pers itu akan mejadi pengawasan dan pertimbangan dari pemerintah selaku penguasa. Dalam pelaksanaannya pemerintah selaku menteri Penerangan tidak pernah menggunakan pengadilan, tetapi menggunakan senjata SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Keadaan inilah yang sebenarnya dinilai beberapa ahli hukum yang mendalami tentang pers pers sebagai tindakan yang keliru. Sebab SIUPP sebenarnya bukan untuk menutup usaha penerbitan berkaitan dengan beritanya, tetapi berkaitan dengan menejaman. Maka penutupan harus melalui KUHP dalam sidang Pengadilan. Cara ini yang tidak di lakukan Harmoko, karena pertimbangannya penyelesaiannya lama dan belum tentu juga berhasil seperti kasus bredel majalah Tempo 1995.

Menurut Muis (1996:2) SIUPP merupakan

salah satu unsur hukum pers nasional yang memperkuat ciri-ciri teori pers otoriter. Sebab menurut Denis Mc Quail (1987), di negara dunia ketiga termasuk Indonesia menganggap pers Indonesia mempunyai ciri teori pers otoriter, karena untuk stabilitas keamanan dan kelangsungan pembangunan. Walaupun Indonesia mengakui mempunyai teori pers yang khas Indonesia yaitu pers Pancasila yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Sebenarnya bredel pada pers dengan menggunakan pencabutan SIUPP adalah melanggar pada UU N0 21/82 dimana kebebasan pers dijamin, sebagaimana pada UU D 45 pasal 28. Keadaan inilah menjadikan teori pers Pancasila yang di veetuskan ada permulkaan Orde Baru 1970 sampai akhir Orde Baru 1998, Era Reformasi dan sampai sekarang tidak pernah tercapai apa yang dimaksud dengan Teori Pers Pancasila secara nyata.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap pers Indonesia adalah komunikasi politik, karena pers Indonesia ditujukan untuk kepentingan politik Orde Baru, yaitu melanggengkan pemerintahan Orde Baru yang anti komunis yang di setujui pers dan pembangunan nasional karena rakyat menghendaki adanya pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan yang telah membelit rakyat Indonesia selama ini, sebagai perwujudan adanya Indonesia merdeka. Pers yang tidak setuju dengan politik Orde Baru tidak dapat hidup di bumi Indonesia. Oleh Karena itu semua Pimpinan Redaksi adalah Pengurus Golkar sebagai Pendukung penuh pemerintah Orde Baru dengan Ketua Umum Pembina adalah Presiden Suharto. Disamping itu tulang punggung Orde Baru adalah ABRI dengan Panglima Tertinggi adalah Jenderal Suharto, Presiden Republik Indonesia. Harmoko menduduki posisi Menteri Penerangan yang berhasil mengendalikan pers indonesia yang didukung ABRI (KOPKAMTIB). Komunikasi politik ini membawa keamanan pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik dimana Pers sangat kuat mempengaruhi opini publik. Sehingga pemrintahan Orde Baru dibawah Presiden Suharto dapat bertahan selama 32 tahun, sebagai pemerintahan terlama didunia.

Dalam komunikasi politik dapat terjadi

adanya keputusan atau kebijakan pemerintah yang “sesat”. Istilah ini dipergunakan Prof A.Muis (1996) untuk menunjukkan kebijakan pemerintah dengan bredel pada suatu media pers. karena kebijakan itu merupakan delik komunikasi politik yang kurang memperhatikan factor kebenaran material pada berita tersebut. Serta mudah menimbulkan kesalahan bertindak. Benar ada “Petunjuk Presiden Suharto” bahwa setiap tindakan bredel kepada suatu media, harus dipikirkan nasib wartawan dan karyawannya. Biasanya mencari pengusaha-pengusaha Konglomerat untuk menerbitkan suratkabara .Sehingga wartawan dan karyawan media pers yang dibredel ,ditutup dapat disalurkan kedia baru itu atau media lain yang mau menampungnya. Namun keadaan ini tidak selalu mulus seperti yang diharapkan pemerintah, sebab tergantung kepada pribadi wartawan atau karyawan itu sendiri.

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia bukan karena diserang dari luar, tetapi gejolak yang terjadi didalam istana sendiri. Demikian pula setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi adalah pembontakan PKI(Partai Komunis Indonesia), DI/TII, OPM, GAM, RMS, APRA, Ratu Adil. Namun kalau kebebasan pers itu ,pihak pers mendukung sepenuhnya sebagai pers yang professional tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia akan lebih sejahtera karena rakyat penuh dengan informasi jujur, yang diterima dari pers memenuhi kriteria yang diberikan pemerintah. Kehidupan dalam interaksi sosial antara pemerintah dengan rakyat terjalin dengan indah, artinya lancar, saling mempercayai, menumbuhkan wibawa. Seperti ipenggambaran ceritera dalam pewayangan mengenai kerajaan Ngamarto, yang dipimpin Pendawa adalah negara yang subur makmur, tatatentrem, kertoraharjo, tukul kang sarwo tinandur,kewan-kewan kang di piara pada bali ana kandange dewe-dewe. Sedangkan secara psikologis pimpinan menyadari akan dirinya sebagai tokoh yang jadi panutan rakyatnya .Pimpinan negara, pimpinan di daerah, pimpinan suatu kelompok tertentu dapat menjadi tokoh teladan. Sebab syarat suatu komunikasi psikologi yang efektif adalah keduanya mempunyai saling kepercayaan

SIMPULAN

Berkat kelihaian Menteri Penerangan Harmoko dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan pers. Walaupun dengan hati yang berat karena dirinya berasal dari wartawan ,jadi bagaimanapun tidak dapat melepaskan nalurinya sebagai wartawan dan kehidupan pers. Demi kelangsungan Orde Baru Menteri Penerangan Harmoko telah mampu mengendalikan pers dengan penuh siasat dan taktik dalam implemementasi mengendalikan pers melalui berkomunikasi media massa/pers, berkomunikasi politik, berkomunikasi sosiologi dan berkomunikasi psikologi dengan membawa korban 7 pers yang harus dibredel, dan korban wartawan kehilangan mata pencaharian, tidak terhitung lagi ribuan karyawan, pengecer yang terkait dengan penerbitan Koran tersebut. Dengan pers yang terkendali, berita terkendali, opini rakyat terkendali, pemerintah Orde Baru dapat bertahan 32 tahun dengan segala keberhasiannya dan kegagalannya. Suatu prestasi luar biasa, sebagai pemerintahan (baca: rezim) yang terlama didunia. ABRI sebagai tulang punggung Orde lama, berada di belakang keberhasilan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ini.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations. Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.
- Adji, Oemar Seno. 1991. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Azzam, Tarman, 2011: Kebebasan Pers dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Penerbit RM Book PT. Wahana Semerta Alam.
- Berger, Arthur Asa. 2003. Media and Society, Rowman and Ltile Field Publisher Inc.
- Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.

- Blake, Reed H and Edwin O. Haroldsen, 2005 :
Taksonomi Konsep komunikasi, Alih
Bahasa: Hasan Bahanaan. Surabaya:
Penerbit Payrus.
- Boyd Barret, O dan Chris Newbold, 1995.
Approaches to the media: areader,
Arnold . New York Barret etc: The
Political Economy Approach.
- Defluer, Melvin L and Sandra J. Ball-Rockeach.
1988. New York: Theories of Mass
Communication, Longman.
- Effendy, Onong Uchjana, 1997: Ilmu
Komunikasi teori dan Praktek.
Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Fisher, Aubrey B , 1978 : teori teori Komunikasi
, Penerjemah Soejono Trimo, PT
Ramaja Rosdakarya , Bandung
- Harmoko. 1986. Komunikasi Sambungrasa.
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Harmoko. 2009. Nasehat Harmoko Untuk
Anak dan Cucu. Jakarta: Penerbit PT
Gria Media Prima.
- Harmoko. 2008. Ada Bom Waktu. Jakarta:
Penerbit PT Gria Media Prima.
- Chesney, Robert MC. 1998. Corporate
Media and the Threat to Democracy
(terj. AJI). Jakarta: Penerbit AJI
- Junaedi, Fajar. 2013. Komunikasi Politik.
Yogyakarta: Penerbit Buku Litera
- Lippman, Walter. 1994. Opini umum, Edisi
Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia
- Littlejohn, Stephen W. 2005. The Theoroies
of Human Communicaton. USA:
Thomson Wadsworth
Belmont.
- Muis, Abdul. 1996. Kontroversi Sekitar
Kebebasan Pers. Jakarta: Mario Grafika
- Mulyana, Deddy. 2007. Komunikasi Suatu
Pengantar. Bandung: Penerbit Remaja
Rosdakarya.
- McQuail, Denis. 2000. Mass Communication
Theory, Forth Edtion, Sage. England:
Publication London.
- McQuail, Denis. 1996. Teori Komunikasi Massa
Suatui Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Nimmo, Dan. 1999. Komunikasi Politik,
terjemahan Tjun Suryaman. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
- Oetama, Yacob. 2001. Biografi 70 Tahun.
Jakarta: Pustaka Gramedia Utama
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Psikologi
Komunikasi. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
- Sejarah Pers di Indonesia, 2002, Gramedia,
Jakarta.
- Sukarno. 1986. Pers Bebas Bertanggungjawab,
Jakarta: Departemen Penerangan RI
- Swantoro, P. 1990. Membuka Cakrawala.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Persatuan Wartawan Indonesia, 1986 :
Indonesia's Journalist anda the
Emergence of the National
Press, PWI Pusat , Jakarta,
- PWI Jaya. 1979. 5 Tahun Hadiah Adinegoro.
Jakarta: Penerbit PWI Jaya
- PWI Jaya. 1993. Sikap Pandang Masysrakat
terhadap Pers Nasional, Hari Pers
Nasional, Jakarta.
- Undang Undang No 21/ 82 tentang Pers.
Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers.
Persuratkabaran Indonesia dalam Era
Informasi, 1986. Kumpulan tulisan 25
tahun Harian Umum Sinar
Harapan,
- KOPKAMTIB JUKLAK N0 17/1982.
Surat Keputusan Dewan Pers N0 05/SK-
DPIII/ 200